

DEMOKRASI DALAM POLITIK IDENTITAS PADA HAJATAN PEMILU 2019

Politisasi isu-isu identitas masih menjadi topik hangat hingga kini. Hal tersebut merupakan sisa-sisa residu dari narasi yang digaungkan oleh kedua belah pihak saat hajatan demokrasi akbar yang berlangsung pada beberapa tahun silam. Penulis tertarik untuk menganalisa sebuah jurnal terbitan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) yang membahas tentang pemilihan umum 2019. Terhitung sejak pertama kali merdeka, bangsa ini telah melaksanakan 11 kali pemilu. Namun, pada pemilu 2019 yang lalu, khususnya pada pilpres (pemilihan presiden) sangat menimbulkan bekas pada seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya, untuk yang kedua kali, Joko Widodo kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto. Berbeda dengan putaran sebelumnya, kali ini kedua paslon hadir dengan narasi-narasi kontroversial yang berakibat pada pembelahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

POLITISASI IDENTITAS DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT PLURAL : BEREBUT SUARA MUSLIM

Pemilu serentak 2019 sangat kental dengan isu politisasi dan identitas agama. Kala itu, kedua paslon memperebutkan suara umat muslim. Munculnya sejumlah isu yang menurut beberapa kalangan umat sebagai sesuatu yang merugikan, memicu adanya sebuah gerakan ijtima ulama yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo-Sandiaga. Sebagian mempercayai bahwa, pengusungan pasangan calon tersebut adalah sebagai representasi ulama dan umat islam. Apabila kita cermati secara mendalam, banyak penolakan atas narasi tersebut, khususnya dari kelompok-kelompok islam lainnya seperti NU (Nahdlatul Ulama) yang merasa tak dilibatkan dalam ijtima tersebut. Sebagai contoh, sebanyak 400 kiai dan pengurus pesantren seluruh Indonesia menyatakan dukungannya terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Jokowi-Maaruf Amin.

Terpilihnya Maaruf Amin sebagai pendamping Jokowi dalam Pemilu 2019 tak lain karena PKB yang memiliki hubungan erat dengan NU, sehingga secara struktural politik pastilah pilihannya tidak akan berbeda, yakni menjadi koalisi pertahana. Selain itu, pilihan Jokowi tidak hanya semata karena kedekatan personalnya dengan NU. Namun, secara tak langsung ia membantah anggapan-anggapan publik yang melayang kearahnya sebagai sosok pemimpin anti islam dan anti ulama. Permainan identitas semacam ini sudah bukan hal baru di Indonesia. Mengingat negara ini merupakan penduduk dengan penganut agama islam terbesar di dunia, menurut penulis hal tersebut sangatlah lumrah. Dari sedari dahulu memang NU sudah dekat dengan pusran istana, para pendahulunya seperti Solahuddin Wahid dan Hasyim

Muzadi pernah menjadi cawapres dan capres dengan kombinasi pasangan nasionalis-agamis. Bahkan, seperti sudah menjadi tabiat, kebanyakan calon non muslim pun pasti akan mempolitisasi identitas agama. Mulai dari pemakaian peci saat foto kampanye sampai menebarkan janji manis akan memajukan umat dalam program nya.

Pada jurnal dijelaskan demokrasi dalam sebuah negara plural dan multikultural, seperti Indonesia dengan mengutip teori etik dari filsuf Jerman yaitu Immanuel Kant yang menyebutkan bahwa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai keanekaragaman kelompok akan memandang sebuah prinsip absolut bagi apa yang mereka yakini sebagai sebuah kebenaran, seperti suku, agama dan ras. Gambaran tersebut sangat terasa dalam pilpres 2019 di mana masyarakat cenderung mengalami pembelahan sosial yang cukup tajam. Penggunaan istilah “cebong” sebagai julukan pendukung Jokowi dan “kampret” sebagai julukan pendukung Prabowo.

PEMILU SEBAGAI REPRESENTASI KEGALAN PARTAI POLITIK DAN SARANA PUNISHMENT BAGI KADER

Pemilu bukan hanya penanda suksesi kepemimpinan, tapi juga merupakan koreksi/ evaluasi terhadap pemerintah dan proses *deepening democracy* untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat. Idealnya, partai politik peserta pemilihan akan menyiapkan kader pilihan yang akan diusung sebagai representasi parpol karena kualitas nya. Namun karena kegagalan fungsi kaderisasi ini, maraknya partai yang memilih mencalonkan kalangan selebritis sebagai caleg. Tujuannya menjadikan selebritis tersebut sebagai *vote getter* partai dalam pemilu. Partai Nasdem, misalnya, tercatat sebagai partai yang paling banyak mengambil artis sebagai calon legislatifnya dalam pemilu 2019.

Di sisi lain, pembenahan internal partai di Indonesia disebutkan oleh beberapa ahli sebagai *mission impossible* karena presentase kader bermasalah lebih dominan. Pemilu dalam hal ini dapat dijadikan sebagai ajang punishment terhadap para kader bermasalah yang ada mempunyai jabatan di pemerintahan dengan tidak memilih nya lagi dalam pemilu atau pilkada selanjutnya. Harapan rakyat pasca pemilu, mereka bisa menyaksikan kinerja pemerintah/parlemen yang lebih berpihak pada nasib rakyat. Karena pemilu diharapkan berkorelasi positif terhadap kesejahteraan rakyat.

DEEPENING DEMOCRACY DAN TANTANGAN NYA DALAM PEMILU 2019

Demokrasi merupakan sebuah sistem dimana pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat. Kita banyak mengenal istilah-istilah dan macam-macam demokrasi di dunia. Beberapa demokrasi tersebut seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, dan lain sebagainya. Pada dasarnya semua konsep ini memakai kata demokrasi yang berasal bahasa Yunani yaitu *demos* artinya rakyat dan *kratein* artinya kekuatan. Hakikat demokrasi merupakan suatu sistem dalam bermasyarakat, bernegara, serta pemerintahan memberikan penekanan bahwa keberadaan kekuasaan ada di tangan rakyat dan rakyat juga memegang kedaulatan yang tinggi dalam sebuah negara. Terdapat 3 hal dalam demokrasi yaitu: pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Pemerintah selaku penerima legitimasi dari rakyat harus mampu menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya dalam menyampaikan aspirasi.

Setiap waktu pandangan tentang demokrasi selalu berubah dan berkembang atau dinamis dan pula semakin kompleksnya hubungan antar warga. Demokrasi mengimplikasikan masyarakat yang mempunyai kebebasan sipil maupun politik dalam tatanan kehidupan bernegara. Usaha demokratisasi masih memerlukan waktu yang panjang bagi lembaga politik, rezim yang berkuasa, dan masyarakat dalam mengupayakan iklim demokrasi yang sehat. Konteks demokrasi dalam pemilu 2019 yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor utama seperti perilaku aktor dan kekuatan politik penunjang. Pelaksanaan pemilihan di seluruh daerah di Indonesia merupakan sebuah pemaknaan demokrasi yang menjadi landasan utama berkembangnya demokrasi di tingkat nasional. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan terobosan penting yang dimaksudkan sebagai upaya pendalaman demokrasi (*deepening democracy*), yakni suatu upaya untuk mengatasi kelemahan praktik demokrasi substantif, khususnya dalam merespon tuntutan-tuntutan masyarakat lokal.

Menurut pemaparan jurnal, demokrasi yang berlangsung selama 21 tahun sejak 1998-2019 masih berjalan dengan berbagai intervensi dari pihak eksternal, dan masih diwarnai dengan kegiatan-kegiatan demokrasi prosedural ketimbang substantif. Kesiapan masyarakat dalam merayakan demokrasi dan menerima informasi dari masing-masing paslon agaknya harus diberikan bimbingan dan pengertian lebih. Karena, hal tersebut sejalan dengan tidak adanya kepastian sosial politik (*social political certainty*) di Indonesia, yang bermula pada maraknya penyebaran berita bohong (*hoax*) dan sentimen-sentimen negatif seperti intoleransi, penistaan agama dan masalah integritas bangsa yang menyangkut persatuan sehingga dapat menimbulkan konflik berkepanjangan.

